



Tingkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan

Bank BPD DIY Resmikan "Kaliba Edu Smart Bank"

Bank BPD DIY bersama-sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Bantul meresmikan layanan Edu Smart Bank sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan bagi siswa di SLB Negeri 1 Bantul.

Dengan nama "KALIBA EDU SMART BANK" layanan tersebut diresmikan oleh Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad bersama dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (OJK DIY), Eko Yuniarto, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikpora DIY dan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bantul dan dihadiri oleh jajaran Direksi Bank BPD DIY pada Selasa (13/8/2024).

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa layanan tersebut hadir untuk memberikan edukasi tentang produk dan layanan perbankan bagi siswa di SLB Negeri 1 Bantul sekaligus memberikan pengalaman langsung tentang layanan dan transaksi keuangan.

"Setiap orang punya hak untuk mendapatkan layanan perbankan yang terbaik termasuk para penyandang disabilitas, untuk itu kami hadirkan edu smart bank di sini untuk lebih mengenalkan layanan perbankan kepada siswa" katanya

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Bank BPD DIY telah membuka layanan edu smart

bank di beberapa sekolah seperti di SMK Negeri 1 Wonosari dan di SMK Negeri 1 Kokap.

"Untuk sekolah luar biasa ini adalah yang pertama, harapannya kedepan kami juga bisa bekerja sama dengan SLB lainnya di DIY" ungkapnya

Kaliba Edu Smart Bank tersebut dikelola dengan mekanisme keagenan sehingga siswa dan guru maupun masyarakat sekitar dapat melakukan berbagai transaksi keuangan dan pembukaan rekening tabungan. "Agen ini dikelola secara mandiri, tentunya dengan pendampingan dari Bank BPD DIY agar tetap aman dan sesuai ketentuan" jelas Santoso

Sementara itu, Kepala OJK DIY, Eko Yuniarto menyampaikan apresiasi kepada Bank BPD DIY atas peran aktif dalam mendukung program peningkatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di DIY.

"OJK bersama dengan Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan masif melakukan edukasi dan literasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk dan jasa keuangan" ungkapnya

Dengan diresmikannya KALIBA EDU SMART BANK ini diharapkan para siswa dan seluruh masyarakat yang terlibat bisa lebih memahami dampak penting inklusi keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Serta meningkatkan implementasi keuangan inklusif.



Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad bersama Kepala OJK DIY, Eko Yuniarto, Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dikpora DIY dan Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bantul memotong pita sebagai tanda peresmian Kaliba Edu Smart Bank di SLB Negeri 1 Bantul



Jajaran Direksi Bank BPD DIY bersama Kepala OJK DIY menyaksikan kegiatan layanan di "Kaliba Edu Smart Bank" di SLB Negeri 1 Bantul



Jajaran Direksi Bank BPD DIY bersama Kepala OJK DIY meninjau galeri hasil karya siswa-siswi SLB Negeri 1 Bantul



Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad menyerahkan secara simbolis beasiswa bagi Siswa SLB Negeri 1 Bantul



Siswa - siswi SLB Negeri 1 Bantul berfoto bersama se usai unjuk bakat dalam bidang seni



Siswa-siswi berprestasi di SLB Negeri 1 Bantul dengan bakat menyanyi dan menjadi wakil DIY dalam ajang lomba menyanyi tingkat nasional

SURAT KE PARPOL SUDAH DIKIRIM

Pengiriman Data Fraksi Maksimal 19 Agustus

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman telah mengirim surat ke partai politik (parpol) yang memiliki anggota di dewan, untuk segera mengirimkan nama fraksi, anggota fraksi dan ketua fraksi. Pengiriman surat maksimal 19 Agustus 2024. Kemudian untuk pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan, menunggu pimpinan definitif.

Ketua DPRD Sementara Gusdan Ganda ST mengaku sudah mengirimkan surat ke parpol yang memiliki anggota di DPRD Sleman. Surat itu untuk meminta kepada partai politik segera mengirimkan nama fraksi, ketua fraksi dan anggota fraksi. "Kami bergerak cepat untuk masyarakat," katanya, Rabu (14/8).

Dikatakan Ganda, batas pengumpulan data fraksi itu maksimal 19 Agustus. Dari 8 parpol yang ada, sekarang ini

baru PDI Perjuangan yang mengirimkan data fraksi. "Kami berharap nanti semua partai itu segera mengirim data fraksi," ujarnya.

Dalam surat itu, pihaknya juga menanyakan apakah masing-masing partai politik menerima partai lain untuk bergabung atau tidak. Mengingat ada dua partai yang tidak bisa membentuk fraksi sendiri yakni PPP dan NasDem karena masing-masing hanya memiliki 3 anggota.

"Membentuk fraksi sendiri itu minimal 4 orang. Apakah nanti PPP dan NasDem mau menjadi satu untuk membuat fraksi atau mereka mau bergabung dengan partai lain. Itu nanti kami komunikasikan dengan mereka," terang politisi dari PDI Perjuangan.

Setelah nanti fraksi terbentuk, Ganda juga akan mengirim surat ke 4 partai untuk mengirim nama pimpinan definitif. Dimana Ketua DPRD dari PDI Perjuangan dengan 13

kursi, Wakil Ketua 1 dari PKB dengan 7 kursi, wakil ketua 2 dari PKS dengan 6 kursi dan wakil ketua 3 dari Gerindra dengan 6 kursi.

"Pimpinan ini berdasarkan peroleh kursi dan suara terbanyak. Karena kebijakan pimpinan definitif itu DPP, kami hanya bisa kirim surat ke pimpinan partai di tingkat kabupaten saja. Nanti akan kami komunikasikan dengan ketua fraksi selaku representasi partai," ujarnya.

Sebelum ada pimpinan definitif, pembentukan alat kelengkapan (alkap) dewan belum dapat dilakukan. Ketika alkap sudah terbentuk, baru dapat membahas anggaran, membuat peraturan da-

erah maupun pengawasan. "Sebelum ada pimpinan

definitif, kami belum bisa melaksanakan ketu-

gasan dewan," pungkasan Ganda. (Sni)-f



Revolusi Hijau untuk Masa Depan Berkelanjutan

PERUBAHAN iklim yang terjadi saat ini menjadi tantangan global yang dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Menanggapi isu tersebut, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Upaya bersama dalam mengatasi dampak perubahan iklim di-

**Bupati Sleman
Kustini**



Kapanewon Depok, dan Padukuhan Sangurejo Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi. Kabar baiknya, dari verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Padukuhan Sangurejo berhasil meraih penghargaan ProKlim Utama yang diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya beberapa waktu lalu di Jakarta Convention Center.

Sebagai prinsiipnya, ProKlim ini tidak bisa diimplementasikan secara maksimal tanpa kerja sama antara Pemerintah dan kelompok masyarakat. Maka dari itu saya berterimakasih kepada masyarakat yang telah mendukung upaya Pemerintah dalam mengintegrasikan tindakan pengurangan perubahan iklim ke dalam kehidupan sehari-hari.

Ke depannya, saya juga berharap agar ProKlim ini menjadi stimulan untuk inovasi-inovasi lainnya yang dilakukan bersama Pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di Sleman. Seiring dengan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, implementasi ProKlim ini dapat dimaknai sebagai kontribusi kita dalam memberikan jaminan pemenuhan atas salah satu hak asasi dari individu yang hidup di negara merdeka, yaitu hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kita dalam mengisi kemerdekaan republik yang kita cintai Bersama ini. Jaga kelestarian lingkungan untuk generasi penerus bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. ■-f

Komitmen Sleman dalam mendukung implementasi ProKlim ini direalisasikan melalui berbagai kegiatan di 17 kapanewon dengan menerapkan pengelolaan sampah, penghijauan dan reboisasi, serta pemberian edukasi dan sosialisasi tentang iklim kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya, ProKlim di Sleman dapat diterapkan secara baik di beberapa padukuhan. Bahkan, atas penerapan ProKlim ini, sebanyak 4 padukuhan telah mengikuti verifikasi lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai penguat program ini, dan masuk ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN). Keempat Padukuhan ini Padukuhan Kalirase Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman, Padukuhan Ngalian Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak, Padukuhan Santren Kalurahan Caturtunggal

RESPONS DRIVER JIP WISATA KONSUMSI PIL SAPI

Dispar Sleman Koordinasi dengan BNN

SLEMAN (KR) - Dinas Pariwisata Sleman tidak bosan-bosannya mengimbau dan menekankan kepada semua pengelola objek wisata, pengelola destinasi wisata dan pelaku wisata untuk selalu berpegang teguh pada Sapta Pesona. Utamanya dalam menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berwisata di Kabupaten Sleman.

"Imbauan itu tidak hanya ditekankan sekali ini saja. Sebelumnya, kami juga gencar menyerukan imbauan tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan forum komunikasi pelaku usaha pariwisata Sleman," ungkap Kepala Dinas Pariwisata Sleman Ishadi Zayid di kantornya, Rabu (14/8), menyikapi adanya driver jip wisata yang di-

tangkap polisi akibat mengonsumsi pil sapi jenis trihexphenidyl.

Menindaklanjuti kasus penangkapan tiga orang tersangka peredaran pil sapi tersebut, menurut Zayid, pekan depan Dinas Pariwisata Sleman akan memanggil seluruh komunitas jip wisata, khususnya di kawasan Kaliurang dan Kaliadem. Dinas Pariwisata Sleman akan menekankan kembali pentingnya mengutamakan keamanan dan kenyamanan wisatawan, sekaligus dampak yang ditimbulkan apabila melakukan pelanggaran.

"Utamanya terkait standar keamanan pengemudi jip wisata, terkait dengan larangan mengemudi dalam keadaan berbahaya seperti mabuk dan atau dalam pe-

ngaruh obat berbahaya. Selain itu, akan disampaikan pula dampak terkait pelanggaran larangan tersebut, baik bagi pengemudi, pengusaha, dan pada citra pariwisata Sleman," kata Zayid.

Ditambahkan, langkah terukur dan sistematis pun disiapkan Dinas Pariwisata Sleman, termasuk menjalin kordinasi dengan instansi lainnya. Hal ini sebagai strategi Dinas Pariwisata Sleman dalam perbaikan pariwisata Sleman di masa yang akan datang. "Salah satunya, koordinasi lebih lanjut dengan BNN Kabupaten Sleman, Kapolresta Sleman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, dan pihak lainnya," tandasnya. (Has)-f